

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

**TENTANG**

**PENERBITAN CO – BRANDING KARTU ATM/DEBIT**

**NOMOR :** .....

**NOMOR :** .....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh (DD-MM-YYYY), bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT BANK SYARIAH INDOENSIA Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Aidil Bustamir** selaku **Area Manager**, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**, dalam hal ini diwakili oleh **Martin Kustati** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan ..... nomor ..... tanggal ....., oleh karena itu berwenang bertindak untuk atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG, berkedudukan dan berkantor di Padang dengan alamat ....., untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi Pemerintah yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui **PIHAK PERTAMA**.
- c) Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka penggunaan produk perbankan syariah **PIHAK PERTAMA** yaitu berupa penerbitan *Co-Branding* Kartu ATM/Debit yang berfungsi sebagai Kartu Tanda Anggota.
- d) Bahwa **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakat untuk menerbitkan *Co-Branding* Kartu ATM/Debit yang berfungsi sebagai Kartu ATM/Debit dan sebagai Kartu Tanda Anggota

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, kata-kata atau istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. Anggota **PIHAK KEDUA** : Adalah setiap orang yang terdaftar dan telah memenuhi semua persyaratan sebagai anggota pada **PIHAK KEDUA**.
2. ATM (*Automated Teller Machine*) : Adalah mesin elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan yang pengoperasiannya menggunakan kartu ATM.
3. *Co – Branding* : Adalah kerjasama penerbitan Kartu ATM/Debit BSI oleh **PIHAK PERTAMA**, di mana Kartu ATM/Debit BSI didesain khusus dengan mencantumkan logo **PARA PIHAK**.
4. Hari Kalender : Adalah meliputi hari raya dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non-banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Hari Kerja : Adalah hari Senin sampai dengan Jumat di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non-banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Kartu *Co–Branding* BSI : Adalah Kartu ATM/Debit BSI yang mencantumkan logo dan/atau nama **PIHAK KEDUA** serta nama nasabah **PIHAK PERTAMA** pada bagian depan kartu dan selanjutnya pada desain belakang kartu tersebut ditampilkan standar penampilan Kartu ATM/Debit BSI termasuk logo dan/atau nama **PIHAK PERTAMA**, dimana kartu ini memiliki fungsi sebagai Kartu ATM/Debit sekaligus juga sebagai kartu Anggota.
7. Kartu ATM/Debit BSI : Adalah kartu yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fungsi sebagai Kartu ATM/Debit.
8. Pemegang Kartu Anggota : Adalah Anggota **PIHAK KEDUA** yang memiliki Rekening Tabungan *Co-branding* yang dibuka di **PIHAK PERTAMA** dan merupakan pemegang Kartu *Co-Branding* BSI.
9. Rekening Induk : Adalah rekening giro yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** khusus untuk kepentingan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
10. Rekening Tabungan *Co-Branding* : Adalah rekening tabungan yang dibuka oleh Anggota **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** khusus untuk kepentingan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** atas dasar kedudukan yang sama dan saling menghormati dalam batas kewenangan masing-masing serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ruang lingkup berupa pembukaan Rekening Induk, pembukaan Rekening Tabungan *Co-Branding* dan penerbitan Kartu *Co- Branding* BSI untuk Anggota **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai Kartu ATM/Debit dan Kartu *Co-Branding* BSI.

## PASAL 3 PEMBUKAAN REKENING

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuka Rekening Induk dengan saldo minimal sebesar Rp2.000.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat perubahan di kemudian hari.
2. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mewajibkan Anggota **PIHAK KEDUA** untuk membuka Rekening Tabungan *Co-branding* dengan saldo setoran awal minimal sebesar Rp100.000,- (seratusribu rupiah) dengan saldo mengendap sebesar Rp50.000,- (lima puluhriburupiah). Untuk itu maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan hal tersebut kepada Anggota **PIHAK KEDUA**.
3. Pembukaan Rekening Induk dan Rekening Tabungan *Co-Branding* dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini
4. Anggota **PIHAK KEDUA** yang telah membuka Rekening Tabungan *Co-branding* akan mendapatkan Kartu *Co-Branding* BSI yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** akan memastikan bahwa setiap Anggota **PIHAK KEDUA** yang akan dibuatkan Kartu *Co-Branding* BSI telah membaca dan memahami segala ketentuan mengenai Rekening Tabungan *Co-Branding* dan penggunaan Kartu *Co-Branding* BSI yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 4 KEPEMILIKAN KARTU DAN PEMBATALAN PENGGUNAAN SEBAGAI KARTU CO-BRANDING

1. Kartu *Co-Branding* BSI Anggota **PIHAK KEDUA** merupakan Kartu ATM/Debit BSI sehingga kartu tersebut sepenuhnya milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan fungsi Kartu *Co-Branding* BSI sebagai Kartu ATM/Debit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, apabila terdapat penyalahgunaan oleh Anggota **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 5 PENGANTIAN KARTU CO-BRANDING YANG RUSAK/HILANG

1. Penggantian Kartu *Co-Branding* BSI yang rusak :
  - a) Anggota Pemegang Kartu *Co-Branding* BSI wajib melaporkan Kartu *Co-Branding* BSI yang rusak tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - b) Apabila kerusakan tersebut dikarenakan oleh kesalahan Pemegang Kartu, maka terhadap penggantian Kartu *Co-Branding* BSI tersebut, Pemegang Kartu dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
  - c) Proses penggantian Kartu *Co-Branding* BSI mengikuti ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penggantian Kartu *Co-Branding* BSI yang hilang :
  - a) Pemegang Kartu *Co-Branding* BSI dengan melaporkan kehilangan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara menghubungi Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA** terdekat.
  - b) Penggantian Kartu *Co-Branding* BSI oleh anggota harus sepengetahuan pihak **PIHAK KEDUA** dengan menvertakan surat permohonan penggantian kartu.

- c) Mekanisme penggantian Kartu *Co-Branding* sesuai dengan ketentuan mengenai penggantian BSI Debit yang berlaku.
- d) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sehubungan dengan kehilangan Kartu *Co-Branding* BSI sampai dengan diterimanya laporan kehilangan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Dengan tidak mengurangi hak-hak **PIHAK PERTAMA** lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a) Menetapkan, menerapkan, dan/atau mengubah ketentuan umum tentang pemegang Kartu *Co-Branding* BSI maupun pemilik Rekening Tabungan *Co-Branding* yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
  - b) Mendapatkan segala data dan keterangan dari **PIHAK KEDUA** tentang Pemegang Kartu maupun pemilik Rekening Tabungan *Co-branding* apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA**
  - c) Dalam hal pembukaan rekening, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap Pemegang Kartu dan dokumen pendukung lainnya.
  - d) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk membuka aplikasi rekening baru **PIHAK KEDUA** dan Anggota **PIHAK KEDUA**
  - e) Menerima berkas/dokumen Pemegang Kartu untuk kepentingan pencetakan Kartu *Co-branding* BSI;
  - f) Menerima penggantian biaya atas pencetakan Kartu *Co-branding* BSI sesuai dengan jumlah pemesanan dari **PIHAK KEDUA**.
  - g) Menerima biaya atas penggantian Kartu *Co-branding* BSI dari Pemegang Kartu dan/atau **PIHAK KEDUA** yang disebabkan terjadinya kerusakan, tertelan mesin ATM dan/atau kehilangan;
2. Dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** wajib untuk:
  - a) Memberikan pelayanan yang maksimal kepada **PIHAK KEDUA** dan Anggota **PIHAK KEDUA**.
  - b) Melakukan penerbitan Kartu *Co-branding* BSI sesuai dengan data dan *design* yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c) Melakukan pembukaan Rekening Tabungan bagi peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku **PIHAK PERTAMA**.
3. Dengan tidak mengurangi hak-hak **PIHAK KEDUA** lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a) Mendapatkan semua layanan dan pengelolaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pembukaan Rekening Induk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
  - b) Memperoleh jaminan terlaksananya pencetakan Kartu *Co-Branding* BSI.
  - c) Pencantuman logo dan/atau nama **PIHAK KEDUA** serta nama Anggota **PIHAK KEDUA** Pemegang Kartu pada Kartu *Co-Branding* BSI.
  - d) Menerima informasi mengenai ketentuan transaksi dengan menggunakan Kartu *Co-Branding* BSI dari **PIHAK PERTAMA**.

4. Dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk:
- Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** nama-nama Anggota **PIHAK KEDUA** yang wajib membuka tabungan untuk memperoleh Kartu Co-Branding BSI dari **PIHAK KEDUA**
  - Memberikan segala data dan keterangan tentang pemegang Kartu *Co-branding* BSI atau pemilik Rekening Tabungan *Co-branding* apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - Mengkomunikasikan program penerbitan Kartu *Co-Branding* BSI kepada setiap Anggota **PIHAK KEDUA**.
  - Menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** secara periodik mengenai hasil program sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini.
  - Membuka Rekening Induk dan mewajibkan Anggota **PIHAK KEDUA** untuk membuka Rekening Tabungan *Co-Branding* sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini.
  - Tunduk pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** terkait pemrosesan transaksi dengan menggunakan Kartu ATM/Debit BSI secara umum maupun Kartu *Co-Branding* BSI secara khusus.
  - Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** nama-nama Anggota **PIHAK KEDUA** yang tidak berhak lagi menggunakan Kartu *Co-Branding* BSI **PIHAK KEDUA**.
  - Mematuhi tata cara pembukaan Rekening Tabungan *Co-Branding* dan Rekening Induk tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 7

##### **BIAYA-BIAYA, PENGADAAN, JUMLAH PEMESANAN KARTU CO-BRANDING DAN PENJAMINAN**

- Biaya-biaya yang timbul atas pembuatan kartu ini menjadi beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA** yang sumber dananya berasal dari Anggota **PIHAK KEDUA** selaku pemegang rekening.
- Pembuatan Kartu *Co-Branding* BSI pada **PIHAK PERTAMA** disepakati minimal sebanyak 300 (tiga ratus) buah kartu atau sesuai pesanan **PIHAK KEDUA**.
- Biaya pembuatan Kartu Co-Branding BSI **PIHAK DUA** adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / per kartu atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yang pembayarannya wajib dilakukan oleh Anggota **PIHAK KEDUA** pada saat awal pemesanan dilakukan.
- Biaya administrasi kartu perbulan adalah Free untuk jenis kartu ATM Silver GPN / per bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- Mengacu pada ayat 1 dan ayat 3 pasal ini, **PIHAK KEDUA** menjamin Anggota **PIHAK KEDUA** untuk membayar biaya pembuatan seluruh kartu sesuai jumlah pesanan. Apabila masih terdapat sisa kartu pada saat perjanjian ini berakhir/diakhiri, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk membayarnya.

#### PASAL 8

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanganinya Perjanjian ini
- Apabila salah satu **PIHAK** tidak akan memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perjanjian ini, **PIHAK** yang tidak akan memperpanjang jangka waktu Perjanjian wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan maksudnya tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

3. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini, tidak ada pemberitahuan dari masing-masing **PIHAK**, maka jangka waktu Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dan demikian seterusnya. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini tetap berlaku pada perpanjangan jangka waktu kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
4. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum Perjanjian ini berakhir jangka waktunya, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
5. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai Perjanjian ini.

#### **PASAL 9 FORCE MAJURE**

1. Masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap **PIHAK** lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya *force majeure*.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban – kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak – hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
3. Apabila salah satu **PIHAK** mengalami suatu keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti- bukti yang layak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, serta masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
4. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tentang *force majeure* dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

#### **PASAL 10 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima dari salah satu **PIHAK** yang bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
  - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi,

- b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut,
  - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban menyimpan dan mengamankan kerahasiaan semua informasi dan data yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta diwajibkan untuk tidak membocorkan informasi dimaksud kepada siapa pun dan tidak diperkenankan untuk mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi dan data dimaksud kepada pihak manapun kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi dan data, atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh **PIHAK** yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK** yang melanggar.
  4. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
  5. Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

## PASAL 11 PENERAPAN APU-PPT

**PARA PIHAK** wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 12 HAK CIPTA

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa setiap produk dan/atau proses yang digunakan berdasarkan maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah berada dalam lisensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pelanggaran salah satu **PIHAK** atas ayat (1) pasal ini, melepaskan **PIHAK** lain dari segala tuntutan hukum yang ditimbulkan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik hak milik intelektual, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, dan menggunakan hasil pekerjaan berupa produk dan jasa termasuk slogan, gambar, logo, dan foto yang merupakan properti masing-masing **PIHAK** baik untuk kepentingannya sendiri maupun pihak lain.
4. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian telah berakhir dengan sebab apapun.

## PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** adalah Badan Hukum yang didirikan secara benar dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki kemampuan untuk saling mengikatkan diri secara hukum berdasarkan Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan anggaran dasarnya berikut seluruh persetujuan atau izin yang diperlukan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini saling menjamin satu terhadap lainnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (professional), itikad baik dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik **PIHAK** lainnya.
4. **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa **PIHAK - PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan **PIHAK - PIHAK** yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan Atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
5. Perjanjian ini mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini dibuat dan **PARA PIHAK** akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan menjunjung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
7. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing **PIHAK** dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

## PASAL 14 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** menetapkan pihak serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimile atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**  
**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**  
**KANTOR CABANG PADANG ULAK KARANG**  
Jalan S. Parman No. 145 A-B  
Ulak Karang Padang 25134  
Telepon: 0751 - 444908

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**IMAM BONJOL PADANG**  
Jalan .....  
Telepon : .....

2. Pembatalan atau perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.
4. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat tersebut diatas dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari kedua, apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan resi pengirim surat;

## PASAL 15 PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama Padang dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang.

## PASAL 16 GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** berjanji untuk melaksanakan Perjanjian secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
2. Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK** lainnya maka agar **PIHAK** tersebut melaporkan kepada **PIHAK** lainnya melalui alamat korespondensi.

## PASAL 17 LAIN-LAIN

1. Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan atau penambahan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam perjanjian ini dan karenanya tidak mengikat **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti klausul atau ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan dan syarat-syarat dan/atau pengertian lainnya dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KEDUA** akan mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia dan segala ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dalam rangka kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai koordinator pembuatan Kartu *Co-Branding* BSI pada **PIHAK PERTAMA**. Kelalaian untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku merupakan resiko dan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 18 PENUTUP

1. Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

Aidil Bustamir  
Area Manager

Martin Kustati  
Rektor UIN Imam Bonjol Padang